

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Samosir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai potensi wisata yang besar, banyak nya objek wisata seperti Pantai pasir putih huta bolon Parbaba, Bukit holbung, Menara pandang Tele, Air terjun sampuran efrata, Pemandian aek sipitu dai. Keadaan letak Kabupaten Samosir yang ada pada tengah Danau Toba ini membuat Pulau Samosir sebagai pulau yang mempunyai pemandangan yang sangat memukai yang sekelilinya adalah Danau Toba. Danau Toba yang adalah danau vulkanik yang paling besar di dunia sebagai salah satu daya tarik utama pengunjung untuk berkunjung ke Kabupaten Samosir. Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan objek wisata. Dan juga, pemerintah daerah pun penting untuk melakukan pengelolaan retribusi objek wisata dengan maksimal.

Untuk pengembangan beragam objek wisata di Kabupaten Samosir, sehingga pemerintah setempat sudah menetapkan beberapa ketentuan. Partisipasi pemerintah pada pengembangan sektor pariwisata begitu mendominasi. Hal ini memiliki penyebab, sebab pemerintah yaitu pihak yang memiliki kewenangan serta bertanggungjawab melakukan pengaturan pembangunan pada setiap daerah yang diaturnya.¹

¹ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan," *Jurnal Inovetera* 1, no. 1 (2021): 71.

Pengelolaan melalui anggaran dan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir merupakan suatu aspek penting dalam Pembangunan pariwisata lokal. Sebagai contoh pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan dapat membantu mengurangi korupsi dan nepotisme, sambil membantu pemerintah lokal dalam mengatur dan mengelola objek wisata dengan efektifitas tinggi.

Salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan negara adalah politik anggaran, yang berdampak besar pada kebijakan public, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Wildavsky, politik pada tahapan menyusun biaya mencakup penjelasan mengenai beragam strategi yang dipergunakan oleh beragam pihak yang terlibat pada proses menyusun biaya dalam meraih tujuan yang ditentukan. Biaya berfungsi sebagai alat utama untuk pemerintah dalam meraih tujuan strategisnya, termasuk meningkatkan atraksi wisata.

Dan juga, politik anggaran dengan serangkaian tahapan yang melibatkan sejumlah aktor politik, ekonomi, serta sosial yang melakukan interaksi untuk menetapkan serta melaksanakan anggaran. Proses-proses ini meliputi pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya finansial pengarahannya dana masyarakat dalam memberikan dukungan suatu program, dan tindak lanjut untuk melakukan pengukuran keefektifan serta pengaruh anggaran.²

Dalam hal pengembangan objek wisata, politik anggaran yang dibuat oleh legislatif atau DPRD Kabupaten harus relevan sebab anggaran publik perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana supaya sumber daya dapat digunakan

² Riyan Jaelani and Muhammad Rizky, "Politik Anggaran Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Maratua," *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 65–78, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/10065%0Ahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/10065/4285>.

dalam memberikan dukungan pertumbuhan pariwisata yang menguntungkan serta berkelanjutan. Dan juga, banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Kabupaten yakni dinas pariwisata, komunitas lokal, perusahaan swasta serta organisasi non-pemerintah, berpartisipasi pada tahapan ini. Cara pemangku kepentingan melakukan interaksi untuk menetapkan anggaran serta mengelolanya akan berdampak pada hasil usaha memperkembangkan objek wisata. Faktor sosial, ekonomi, serta politik pun mempengaruhi politik anggaran pariwisata.

Dengan kompetisi pada industri pariwisata yang semakin ketat di seluruh dunia, pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien akan semakin semakin krusial. Hal ini disebabkan oleh peraturan nasional, keputusan politik pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal dan aspirasi serta keperluan masyarakat.

Analisis politik anggaran dalam pembangunan pariwisata lokal dapat menampilkan berbagai macam aspek, seperti: Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, Peran pemerintah lokal dalam pengelolaan anggaran, Peningkatan pendapatan dari objek wisata, pengelolaan retribusi yang efektif. Pada umumnya, pengelolaan anggaran dan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir sangat penting dalam pembangunan pariwisata lokal. Dengan analisis politik anggaran dan implementasinya yang baik, pemerintah setempat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran.

Kabupaten Samosir masuk pada daerah yang bisa menambah peningkatan pertumbuhan ekonomi atau memberikan dukungan dalam pembangunan daerahnya dengan bidang pariwisata. Hal itu memperoleh dukungan langsung oleh posisi

Kabupaten Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, maka dapat membuatnya menjadi pulau yang memiliki objek wisata indah yang cocok dikunjungi sejumlah pengunjung. Kabupaten Samosir mempunyai potensi beraneka ragam tempat wisata, contohnya potensi alam, budaya, rekreasi, serta rohani. Objek wisata ini mengalami penyebaran ke sejumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir. Sektor industri pariwisata dijadikan sebagai sebuah contoh sektor yang bisa diandalkan untuk penerimaan daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Samosir diberikan tuntutan supaya bisa mengeksplor serta melakukan melakukan pengelolaan inovasi baru untuk membeikan anggaran pengeluaran daerah dengan retribusi yang diperoleh dari setiap objek pariwisata pada masing-masing daerah (Sutrisno, 2013: 435).

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah PAD (Rupiah) ¹	Jumlah kunjungan Wisatawan (Orang)²
2015	34.303.000.000	175.463
2016	28.650.000.000	190.728
2017	72.229.000.000	278.059
2018	47.441.000.000	378.649
2019	58.823.000.000	418.271
2020	60.373.000.000	405.203
2021	432.158.953.613	663.848
2022	730.653.938.817	860.892

2023	78.243.359.252	1.008.731
2024	653.260.000.000	89.348/ juli

Sumber: Diolah oleh peneliti

https://sasada.samosirkab.go.id:443/api/bpkpd_pada_dari_sektor_pariwisata_satuan_rupiah/all

Tabel 1.1 menguraikan banyaknya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Samosir. Jumlah Pendapatan Asli Daerah ini adalah bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan sebagainya PAD yang sah. Tahun 2015 dan 2016 PAD menurun, tahun 2017 kembali meningkat dengan signifikan senilai Rp.72.229.000.000. Saat itu bidang pariwisata menjadi pemberi sumbangan yang paling besar pada pendapatan retribusi serta pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir.

Pada tahun 2018 banyaknya Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Samosir menurun lagi dengan pesat senilai Rp. 47.441.000.000. Berikutnya banyaknya Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami peningkatan tahun 2019 sebab pemasukan pajak daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang dilakukan pemisahan, retribusi daerah, dan lain sebagainya PAD serta hal itu berlanjut hingga tahun 2020 pada Rp. 60.373.000.000. Pada Tahun 2021 Pendapat Asli Daerah meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, lalu di tahun 2022 PAD meningkat yang juga cukup signifikan dan merupakan tahun yang memiliki PAD paling tinggi yakni sebesar Rp. 730.653.938.817.

Dan pada tahun 2023 PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 78.243.359.252. Kemudian pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah kembali naik

yakni sebesar Rp. 653.260.000.000 yang dimana nominal tersebut cukup besar.³ Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat pesat, hal ini dialami sebab pengembangan objek wisata menarik banyak pengunjung, maka pemerintah juga turut gencar melakukan pembukaan lahan dalam menambah peningkatan objek wisatanya. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat lagi cukup signifikan.

Serta di tahun 2017-2020 banyaknya kunjungan wisatawan tidak terdapat penurunan bahkan mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2021-203 jumlah kunjungan wisatawan pun terus meningkat. Melalui berkembangnya objek wisata di Kabupaten Samosir memberikan partisipasi yang besar terhadap PAD dari bidang pariwisata. Sektor pariwisata memiliki andil besar untuk meningkatkan pemasukan ekonomi pada Kabupaten Samosir.

Dari penjelasan di atas masih terdapat naik turun nya PAD objek wisata Kabupaten Samosir, sehingga penting adanya kebijakan anggaran serta pengelolaan anggaran yang baik dan tepat sasaran agar dapat mendorong pengembangan pariwisata local. Kebijakan anggaran yang diterapkan di Kabupaten Samosir belum sepenuhnya berhasil mendukung pengembangan pariwisata lokal, dan kepentingan politik dan ekonomi elit lokal seringkali mendominasi proses penganggaran serta kurangnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran pariwisata .⁴ Politik anggaran dapat dimengerti melalui penyelidikan terhadap pola perilaku serta kewenangan

³ Stephy Yohan L Tobing, "Bab I" bersama *Galang Tanjung*, no. 2504 (2015): 1–9.

⁴ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

kewenangan. Hal itu adalah pintu manifestasi dari manifestasi dari distribusi kekuasaan sejumlah aktor untuk membuat ketentuan anggaran. Oleh karena itu bisa dipahami jika tarik menarik pada sejumlah aktor utama pada penyaluran anggaran, berkaitan erat dengan keinginan dalam membesarkan setiap dampaknya, seperti yang ada di terakomodasinya keperluan aktor.

Dalam mengerti tahapan dalam menyusun anggaran dibutuhkan pengertian mengenai;

- a) Struktur formal peran serta tanggungjawab pada tahapan pemberian anggaran,
- b) Andil pemerintah untuk mengambil keputusan, pilhan politik serta akuntabilitas dalam sistem manajemen pengeluaran publik,
- c) Jaringan kekuasaan serta dampak *stakeholders* (di luar proses formal) yang menentukan hasil dari tahapan anggaran,
- d) Insentif yang diberikan (baik tersembunyi ataupun terang-terangan) terhadap tindakan yang menentukan politisi serta birokrasi untuk mengambil keputusan pada waktu menyusun serta menetapkan anggaran,
- e) Ruang untuk mengembalikan keputusan birokrasi di seluruh level tahapan menetapkan anggaran

Implementasi kebijakan anggaran yang tidak efektif dan terorientasi terhadap kinerja akan berpotensi menyebabkan kegagalan penyusunan rencana yang sudah dibuat. Pengelolaan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir penting dalam menambah peningkatan pemerata kesejahteraan rakyat. Retribusi daerah yang efektif dan terorientasi pada kinerja akan sebagai salah satu sumber

pembiayaan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan daerah. Implementasi kebijakan anggaran serta pengelolaan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir perlu dilakukan dalam konteks pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memiliki kekuatan dan ketertiban yang dapat mengatur dan mengawasi pengelolaan objek wisata terhadap hal pengawasan. Penilaian dan evaluasi terhadap wilayah pemungutan retribusi, penentuan, tempat, angsuran, serta penundaan pembayaran harus dilakukan secara transparan dan efisien.

Penelitian ini memiliki posisi sebagai tambahan keilmuan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran dari retribusi objek wisata diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata lokal, mengingat pariwisata merupakan sektor strategis di Kabupaten Samosir karena politik anggaran yang tidak tepat dapat menghambat pengembangan potensi wisata lokal. Penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana retribusi objek wisata yang seharusnya digunakan untuk memadai sarana prasarana pariwisata. Serta, penelitian ini juga menjelaskan apakah pengelolaan retribusi objek wisata tepat sasaran yakni diarahkan untuk kesejahteraan Masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata lokal. Atas dasar pemaparan diatas maka studi yang dilaksanakan juga memiliki tujuan dalam menganalisis dinamika politik anggaran dan pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Samosir dengan studi kasus pada pengelolaan anggaran retribusi objek wisata yang dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena politik anggaran serta pengelolaan retribusi terhadap objek wisata di Kabupaten Samosir masih belum optimal.

Studi yang dilaksanakan dari sejumlah studi sebelumnya, temuan studi terdahulu dipergunakan menjadi referensi dan menjadi usaha untuk menambah sumber wawasan mengenai persoalan yang diangkat. Ditemukan beberapa studi sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan diantaranya:

Peneliti Robby Zuniandi (2021) yang memiliki judul “Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan” dalam tulisannya penulis menjelaskan alokasi anggaran dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kab. Aceh Selatan begitu minim. Pemerintah sekedar mampu melakukan pengalokasian anggaran pada jumlah yang terbatas guna pengembangan suatu daerah wisata saja, dan pola penyelenggaraan retribusi objek wisata di Aceh Selatan memang dengan alami masih layak dan begitu bagus namun masih tidak memadainya bantuan dari pemerintah untuk anggaran pada pengembangan objek wisata yang terdapat.⁵

Kedua, peneliti Ahmad Mustanir (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kaupaten Sidenreng Rappang” dalam tulisannya penulis menjelaskan jika pada penerapan kebijakan peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 mengenai pelayanan pasar sudah berdampak pada penerimaan retribusi yang meningkat di Lancirang Kabupaten Sindereng serta keefektifan

⁵ Robby Zuniandi (2021) dengan judul “Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan” h.2-4

dalam mengelola retribusi pasar oleh dinas pendapatan daerah pun berdampak pada penerimaan retribusi yang meningkat di wilayah tersebut.⁶

Ketiga peneliti Litha Maria Tanod, William A.D.Areros, Very Y dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara” dalam tulisannya penulis menjelaskan jika penerapan ketentuan dengan aspek ukuran serta tujuan peraturan, sumber daya, karakteristik agen yang melaksanakan, sikap atau kecenderungan sejumlah penyelenggara, komunikasi pada setiap organisasi serta kegiatan pelaksana, dan lingkungan ekonomi dan sosial belum dilaksanakan secara baik untuk mengelola objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini dialami sebab :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum mempunyai peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum yang jelas untuk mengembangkan dalam mengelola objek wisata di Pantai Kombi.
2. SDM yang mengelola objek wisata milik desa belum mempunyai kapasitas yang memadai dan belum didorong oleh tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang serta anggaran dalam mengelola objek wisata menjadi lebih baik. Kondisi yang terjadi memiliki perbedaan terhadap pengelolaan objek wisata milik perorangan yang mempunyai SDM yang dinilai profesional, fasilitas objek wisata yang lebih memadai dan pengelolaan anggaran yang profesional.⁷

⁶ Ahmad Mustanir (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kaupaten Sidenreng Rappang”h.6-9

⁷ Litha Maria Tanod, William A.D.Areros, Very Y dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara”h.11-15

Hal yang membedakan sejumlah studi sebelumnya terhadap studi yang dilaksanakan oleh peneliti bahwa studi memiliki fokus aspek yang berbeda terhadap topik yang serupa serta pertanyaan penelitian terdahulu yang diajukan dalam penelitian akan berbeda dengan pertanyaan yang ingin di jawab penulis, dan pada penelitian terdahulu berfokus pada politik anggaran dan pengelolaan retribusi serta implementasi kebijakan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan peneliti ingin menganalisis kebijakan politik anggaran dan pengelolaan retribusi terhadap objek pariwisata dan pengembangan pariwisata lokal yang terdapat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yakni kebijakan politik anggaran serta pengelolaan retribusi dalam objek wisata kabupaten samosir erta pengembangan terhadap pariwisata lokal sehingga rumusan permasalahan pada studi yang dilaksanakan yaitu:

1. Bagaimana dinamika kebijakan politik anggaran pada sistem retribusi di objek wisata terhadap pengembangan pariwisata lokal Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana upaya dalam transparansi penggunaan/alokasi anggaran dalam tata kelola dana retribusi objek wisata Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai pada permasalahan yang disebutkan, sehingga tujuan penelitian yang dilaksanakan yaitu:

1. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis dinamika kebijakan politik anggaran pada sistem retribusi pada objek wisata terhadap pengembangan pariwisata lokal Kabupaten Samosir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam transparansi penggunaan / alokasi anggaran dalam tata kelola dana retribusi objek wisata Kabupaten Samosir.

1.4. Manfaat Penelitian

Kajian yang dilaksanakan diinginkan mampu memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat akademis / teoritis

Secara teoritis kajian ini mampu bermanfaat:

Studi yang dilaksanakan diinginkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi pada studi akademik dan juga memberikan masukan untuk penyusunan studi yang serupa, dan diinginkan mampu dipergunakan menjadi sumber pemahaman untuk pemecahan masalah yang muncul berkaitan dengan politik anggaran pada pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir.

2. Manfaat Praktis

Untuk Mahasiswa

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang politik anggaran dan pariwisata, khususnya terkait dinamika kebijakan anggaran, pengelolaan retribusi dan pengembangan pariwisata lokal
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
- c. Memberikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kebijakan politik anggaran dan pariwisata.
- d. Menjalin jejaring dan kerjasama penelitian antara akademisi, pemerintah dan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah

- a) Memberikan masukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan anggaran dan pengelolaan pariwisata yang lebih efektif dan efisien
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pariwisata
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar objek wisata

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Teori Kebijakan Anggaran

Anggaran yaitu “alat perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam organisasi yang bersifat jangka pendek, biasanya berlangsung selama satu tahun”. Supriyono mengatakan anggaran yaitu alat penyusunan rencana serta kontrol yang efektif pada sebuah organisasi diperoleh dan digunakan, yang secara formal dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Anggaran adalah hal yang begitu krusial bagi pemerintahan desa ataupun kabupaten untuk mencapai pembangunan.

Menurut Mardiasmo , anggaran adalah suatu pernyataan dalam bentuk finansial dari hasil yang diinginkan bisa dipenuhi pada suatu jangka waktu. Penganggaran di sisi lain adalah tingkat atau metode penganggaran. Mardiasmo juga menjelaskan prinsip penganggaran di sektor publik, yaitu anggaran publik harus mendapatkan persetujuan legislatif sebelum pemerintah dapat membelanjakannya. Keakuratan sasaran anggaran dapat diukur melalui penggunaan kajian varians anggaran. Analisis varians anggaran menganalisis perbedaan pada rencana atau tujuan dengan hasil.

Menurut Mardiasmo , "penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”. Pemahaman ini menangkap peran strategis anggaran pada pengelolaan asset. Organisasi sektor publik tentu ingin menyediakan pelayanan yang sebesar-besarnya terhadap publik, tetapi cita-cita yang bersangkutan kerap terhambat oleh terbatasnya sumber daya. Hal tersebut mengakibatkan dituntutnya

peran penting anggaran.⁸

Siklus anggaran terdiri dari 4 tahap, menurut Mardismo, "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran".

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*). Dalam tahap menyiapkan anggaran, tafsiran pengeluaran diciptakan berlandaskan dengan tafsiran pemasukan yang ada. Dalam hal ini, penting untuk dilihat jika akan memberikan persetujuan tafsiran pengeluaran perlu dilaksanakan penafsiran pemasukan yang lebih tepat.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*). Dalam tahap yang dilaksanakan, tahapan politik yang begitu relevan dipergunakan dan seluruh masukan dari organisasi, elemen organisasi atau institusi dievaluasi serta didiskusikan berdasarkan pada kemampuan dana yang ada.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*). Pada tahap yang dimaksud, keuangan publik perlu melihat ketersediaan sistem informasi akuntansi serta kontrol manajemen. Anggaran perlu dilakukan berdasarkan pada yang sudah disetujui. Anggaran yaitu pedoman dasar yang perlu dipatuhi oleh seluruh individu pada setiap institusi yang berkaitan hingga suatu batasan.

⁸ K Kadir and D Stiadi, "Efektivitas Pemungutan Dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2017).

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*). Tahap ini berkaitan pada akuntabilitas, apabila tahap penerapan sudah didukung dengan tahap akuntabilitas serta sistem kontrol manajemen yang optimal, sehingga diharapkan tahap laporan serta evaluasi anggaran tidak diinginkan terjadi kendala. Bersama tujuan pelaporan serta evaluasi anggaran guna melihat apakah penyelenggaraan anggaran sudah berlangsung berdasarkan pada rencana yang telah disetujui.⁹

Kepentingan politik sangat mempengaruhi anggaran negara karena perjanjian antara legislatif dan eksekutif. Anggaran adalah pengalokasian dana untuk mendukung segala aktivitas yang terkait dengan keberadaan kebijakan publik. Setiap bagian dari anggaran organisasi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat fungsi pokok, yakni:

1. *Planning* (Perencanaan), fungsi ini menetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, target yang ingin diraih, perencanaan yang kemudian dipergunakan dan lain-lain. Fungsi ini berhubungan pada semua hal yang akan dibuat serta diraih di kemudian hari termasuk penetapan produk yang ingin diproduksi, bagaimana memperolehnya, sumber daya yang diperlukan dalam memperoleh produk yang bersangkutan, bagaimana pemasaran produk yang bersangkutan dan lain-lain.
2. *Organizing* (pengorganisasian), sesudah menetapkan apa yang akan diraih lembaga tersebut di masa depan, pengorganisasian adalah saat yang tepat untuk

⁹ “Proses Penganggaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1036, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1036-1050>.

mencari sumber daya untuk mencapai rencana tersebut. Hal ini dimulai dengan mencari bahan baku, menemukan mesin yang diperlukan guna pengelolaan produk tersebut, tenaga kerja yang memenuhi syarat, dan modal yang diperlukan dalam memperoleh produk yang ditargetkan.

3. *Actuating* (menggerakkan), sesudah sumber daya yang diperlukan didapatkan, tugas manajemen berikutnya yaitu memberikan arahan serta melakukan pengelolaan semua sumber daya yang bersangkutan supaya bisa dipergunakan bersama setiap fungsinya.
4. *Controlling* (pengendalian), sesudah sumber daya yang diperlukan perusahaan dikumpulkan dan diatur untuk melaksanakan fungsinya, langkah selanjutnya yaitu menjamin jika semua sumber daya berfungsi berdasarkan pada rencana yang sudah disusun guna memastikan jika tujuan umum bisa tercapai .¹⁰

Implementasi kebijakan anggaran yang efektif dalam pengembangan pariwisata lokal merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Berikut beberapa aspek penting dalam implementasi kebijakan anggaran tersebut:

- a. Perencanaan yang matang: kebijakan anggaran harus disusun dengan jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi wisata lokal, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta target yang ingin dicapai. Analisis kebutuhan mendalam diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pengembangan pariwisata di daerah setempat. Hal ini

¹⁰ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

dapat dilakukan melalui melibatkan beragam pihak yang memiliki kepentingan, contohnya masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, serta akademisi serta alokasi anggaran harus dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan skala dan kompleksitas proyek pengembangan pariwisata.

- b. Pelaksanaan yang efisien dan efektif yakni tim pelaksana yang terdiri dari individu-individu kompeten dan berpengalaman di bidang pariwisata dan pengelolaan keuangan perlu dibentuk untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, efektif dalam mencapai tujuan, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran serta memperhatikan keterbukaan dan akuntabilitas pada proses pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan publik serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang lain untuk monitoring dan evaluasi.
- c. Pelibatan masyarakat lokal, masyarakat lokal harus diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam tahapan memperkembangkan pariwisata, yang dari penyusunan rencana hingga penyelenggaraan dan memperoleh manfaat ekonomi dari sektor ini.
- d. Kerjasama antar pemangku kepentingan, koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pengembangan pariwisata, serta kerjasama dengan sektor pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan sektor

lain, seperti infrastruktur, budaya, serta lingkungan, untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan serta bermanfaat untuk masyarakat secara luas.

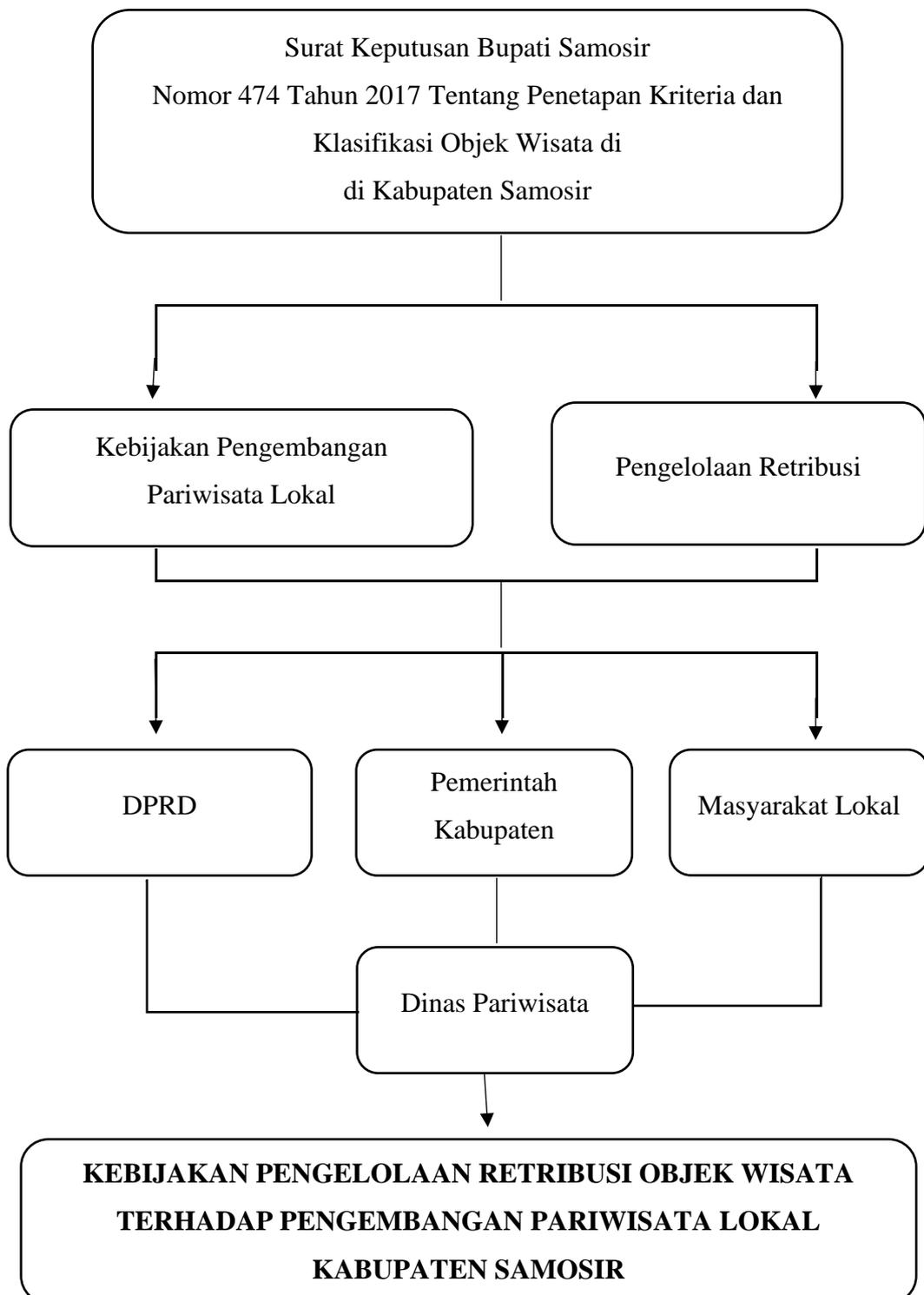
1.6. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan alur proses penelitian berbentuk bagan yang dibuat untuk menggambarkan hasil atau pemaparan secara tekun dan cermat terhadap fenomena yang diteliti dengan teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya. Menurut Sugiyono, kerangka pikir adalah alur berpikir atau alur kajian yang menjadi pola atau acuan berpikir peneliti untuk menyelenggarakan studi pada suatu objek. Sehingga kerangka berpikir adalah alur yang menjadi pikiran peneliti untuk menyelenggarakan penelitian pada objek tertentu yang bisa menuntaskan masalah serta tujuan penelitian.¹¹

Dengan kata lain Kerangka pikir merupakan gambaran alur logis yang menjelaskan hubungan antara konsep, variabel dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir berfungsi sebagai pedoman dalam proses analisis dan interpretasi data. Biasanya kerangka pikir disajikan berbentuk diagram ataupun bagan yang menjelaskan dan memperlihatkan hubungan antara variabel secara visual.

Maka kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu.

¹¹ Hermawan Iwan, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode," 2019, 32.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir diatas menunjukkan alur pemikiran tentang hubungan antara beberapa elemen dalam konteks politik anggaran terkait dengan pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir.. Penjelasan singkat dari tiap elemen:

1. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 sebagai dasar hukum utama yang menetapkan kriteria dan klasifikasi pengelolaan retribusi dan kebijakan pengembangan pariwisata lokal.
2. Surat keputusan ini berdampak pada dua aspek utama:
 - Pengelolaan retribusi
 - Kebijakan pengembangan pariwisata lokal
3. Kedua aspek ini melibatkan beberapa aktor penting seperti: Dinas pariwisata, Pemkab (Pemerintah Kabupaten), Masyarakat lokal
4. Keseluruhan dinamika ini kemudian berpengaruh pada politik anggaran, terutama dalam hal dinamika pengelolaan retribusi objek wisata yang akan memengaruhi pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Samosir.

Bagan diatas menggambarkan interaksi antara kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan retribusi, serta dampaknya terhadap pengembangan pariwisata lokal melalui peran Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Studi kualitatif merupakan kebiasaan khusus pada ilmu-ilmu sosial, baik bidang ataupun terminologinya yang sebenarnya didasarkan pada pengamatan manusia. Pendekatan deskriptif akan digunakan dalam menyajikan penelitian ini. Dengan kata lain, metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu cara penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti (individu, institusi, masyarakat dan sebagainya) menurut sejumlah fakta yang terlihat. Studi deskriptif merupakan upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis atau menafsirkan suatu kondisi yang sedang terjadi. Bisa dikatakan, tujuan studi deskriptif yaitu mendapatkan informasi tentang kondisi sekarang ini, serta mengidentifikasi hubungan pada setiap variabel yang terdapat.

Dalam studi yang dilaksanakan penulis mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif mempergunakan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang berfokus mempelajari suatu kasus tertentu secara mendalam. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Dinamika Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Retribusi pada Objek Wisata di Kabupaten Samosir.

1.7.2. Fokus Penelitian

Menetapkan fokus riset memiliki dua tujuan. Pertama, menentukan focus studi memberikan batasan penelitian. Kedua, penentuan fokus penelitian dapat membantu mencapai standar atau memasukkan dan mempublikasikan informasi baru yang didapatkan di lapangan. Terdapat yang dijadikan sebagai fokus pada

studi yang dilaksanakan adalah Kebijakan Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya riset yang dilaksanakan. Studi akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, khususnya di kantor DPRD dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Peneliti menentukan lokasi yang bersangkutan sebab Kabupaten Samosir ditemukan banyak objek wisata yang berkembang pesat sehingga dijadikan sebagai *icon* dan destinasi utama pariwisata Sumatera Utara sehingga pentingnya perhatian khusus serta pengelolaan yang tepat.

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan dipisahkan menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dihimpun langsung langsung dari sumber primer, contohnya individu atau kelompok tanpa melalui perantara. Data primer meliputi data aktual yang diperoleh dari riset di lapangan melalui komunikasi bersama sejumlah individu yang menjadi subjek langsung penelitian. Data penelitian primer merupakan hasil wawancara langsung bersama narasumber yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung terhadap subjek penelitian dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan digunakan untuk

melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan serta laporan dari berita harian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan langsung di lapangan melalui penggunaan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode analisis data Dimana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan langsung dengan arah penelitian yang diteliti. Wawancara yang kemudian dipergunakan peneliti yaitu wawancara yang memiliki jenis terarah, yakni wawancara yang daftar pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan dari wawancara terarah adalah untuk membantu mengkategorikan pengumpulan data dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dalam survey untuk memperoleh informasi yang selaras dengan arah penelitian.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data melalui cara meneliti buku-buku, literatur, catatan harian, dan beragam laporan yang berhubungan pada masalah yang akan dipercahkan.¹²

¹² Milla Tunna Imah and Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkup Pendidikan," *Doctoral Dissertation, State University of Surabaya*, 2018, 274–82.

3. Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data melalui penggalian informasi yang dilaksanakan mempergunakan metode memeriksa serta melakukan pencatatan sejumlah dokumen yang berdasarkan pada permasalahan serta fokus studi. Metode ini dipegunaan dalam melangkapi data yang diperoleh dengan wawancara serta observasi.

1.7.6. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada studi yang dilaksanakan mempergunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan. Metode *purposive sampling* merupakan suatu metode pemilihan informan atau sumber informasi dengan tujuan tertentu, berdasarkan tema penelitian dengan asumsi informan tersebut memiliki informasi yang butuhkan dan dipergunakan pada riset. Kaitannya dengan hal ini peneliti menentukan informan yang diyakini memiliki wawasan dan pemahaman tentang masalah yang diobservasi serta bisa memberikan informasi yang bisa diperkembangkan dalam menghasilakan data.

Maka pada studi yang dilaksanakan informan yang dipilih yaitu pemangku kepentingan yakni:

No	Informan	Keterangan
1	Nasip Simbolon	Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir
2	Parluhutan Samosir	Anggota Badan Anggaran DPRD Kab.Samosir (yang mewakili)
3	Vandiko T.Gultom, ST	Bupati Kabupaten Samosir ataupun yang mewakili

4	Tetti Naibaho, S. Sos	Kepala bidang pengembangan pariwisata Disbudpar Kabupaten Samosir atau yang mewakili
5	Masyarakat Lokal (pelaku UMKM di sekitar objek wisata	Pengunjung wisata (mewakili 5 orang)

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu tahapan melakukan pembelajaran serta melakukan pengolahan data guna menganalisis pola, hubungan, serta informasi penting di dalamnya yang dikenal sebagai analisis data. Analisis data dilaksanakan pada waktu tahapan mengumpulkan data dalam studi kualitatif. Analisis induksi digunakan untuk menganalisis data. Metode ini melibatkan peneliti yang memiliki hipotesis sementara sebelum terjun ke lapangan, dan kemudian menentukan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Metode kualitatif menghimpun data menurut fakta, bukan teori. Dengan demikian, analisis data dilaksanakan dengan induktif menurut apa yang terjadi dilapangan, sehingga hipotesis dapat dibuat..

Analisis data yang akan dilaksanakan peneliti yaitu analisis sesudah berada di tempat penelitian menggunakan model Miles dan Huberman.

Berdasarkan penuturan Miles dan Huberman, kegiatan pada data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berjalan berkelanjutan sampai selesai.

Dengan model ini, tahapan aktivitas analisis data dipisahkan ke dalam empat tahapan, yakni:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan observasi, Penyajian data dapat dilakukan wawancara mendalam, dan dengan uraian singkat, bagan, dokumentasi atau gabungan ketiganya yakni hubungan antar kategori tersebut.

2) Reduksi data

Sesudah mendapatkan seluruh data, dilaksanakan pemilihan data atau reduksi dalam menyederhanakan serta mengelompokkan data yang terdapat maka mudah dalam ditampilkan.

3) Penyajian data

Pada tahapan ini data dilakukan penyusunan dalam menyampaikan informasi, maka memudahkan dalam menarik kesimpulan.

4) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah temuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berbentuk deskripsi atau interpretasi sebuah objek yang dinilai tidak cukup jelas dan belum pasti maka sesudah dilakukan penelitian menjadi jelas serta bisa berbentuk hubungan sejumlah kasual atau interaktif (studi dilaksanakan mempergunakan metode mendalam dan mengumpulkan data langsung dari sejumlah individu yang ada di lingkungan yang diteliti). Pada tahap ini, data dilakukan penyusunan pada poin yang tidak sama, guna mendapatkan data yang lebih detail berdasarkan pada fokus riset yang sudah ditentukan.

1.7.8. Keabsahan Data / Triangulasi Data

Sebuah contoh metode yang dipergunakan studi guna menemukan serta mengimplementasikan metode pengolahan data kualitatif yaitu triangulasi. Teknik

triangulasi bisa dianggap menjadi metode untuk memeriksa keabsahan data melalui perbandingan temuan wawancara terhadap subjek studi.¹³ Triangulasi mengkombinasikan beragam metode dalam mengumpulkan data serta sumber data yang telah terdapat guna menjadi salah satu metode pengolahan data kualitatif. Triangulasi dipergunakan dalam menganalisis data yang tidak sama yang didapatkan dari seorang yang memberikan informasi serta data yang didapatkan dari informan yang lain.¹⁴ Maka dari itu dalam melakukan pengujian keabsahan data atau triangulasi pada studi yang dilaksanakan mempergunakan:

1. Metode Triangulasi

Triangulasi metode terjadi Ketika data dikumpulkan dengan metode yang berbeda-beda. Ini biasanya terjadi pada studi kualitatif, Dimana peneliti mempergunakan metode seperti wawancara, observasi serta survei. Semua metode ini digunakan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat serta mendapatkan interpretasi yang lengkap tentang informasi yang peneliti kumpulkan.

Peneliti mempergunakan wawancara bebas serta terstruktur, peneliti juga melakukan pengamatan dalam mendapatkan kepastian keakuratan informasi tersebut. Peneliti pun bisa mempergunakan beragam informan dalam memastikan kebenaran informasi tersebut. Diinginkan temuan yang mendekati kebenaran kemudian diraih dengan diskusi beragam sudut pandang.

¹³ Cindya Chandra Pradipta, Ucik Fuadhiyah, and Mujimin Mujimin, "Dimensi Kekontekstualan Materi Buku Basa Jawa Trampil Ing Basa Trapsila Ing Bawa," *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa* 10, no. 2 (2022): 147–60, <https://doi.org/10.15294/piwulang.v10i2.51654>.

¹⁴ Pahri Fahlevi and Athania Octaviani Puspita Dewi, "ANALISIS APLIKASI IJATENG DENGAN MENGGUNAKAN TEORI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 103–11.

2.Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu proses mempelajari kebenaran suatu informasi mempergunakan beragam sumber data contohnya dokumen, arsip, temuan wawancara, temuan observasi atau melalui wawancara beberapa subjek yang dinilai mempunyai perspektif yang berbeda.

Pastinya setiap metode memperoleh bukti atau data yang tidak sama, yang berikutnya memberikan perspektif yang berbeda juga tentang kejadian yang diamati.